



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

### SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA APEL AWAL BULAN MEI 2008

Hari : Senin  
Tanggal : 5 Mei 2008

Yang saya hormati,

- Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Kepada Bappeda, Kepala BKD, Kepala Bapedalda, dan Kepada Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat;
- Para Kepala Biro Setda Provinsi Kalimantan Barat;
- Serta para PNS peserta apel yang saya banggakan.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Mengawali sambutan pada apel awal bulan Mei 2008 ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta perlindungan-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti apel awal bulan ini sebagai bagi dari kewajiban yang diamanahkan kepada kita dalam menjalankan tugas.

Saudara-saudara peserta apel yang berbahagia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang demikian luas, serta tuntutan pelayanan dari masyarakat yang sedemikian rupa di era keterbukaan saat ini, mengharuskan kita di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus berupaya pencapaian perbaikan, agar terbangunnya pemerintahan yang responsive dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tertib di dalam pengelolaan barang daerah.

Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, harus dikelola dengan baik dan benar serta memenuhi akuntabilitas.

Untuk mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, pada tahun 2008 ini akan melaksanakan kegiatan Sensus Barang Daerah, dimana kegiatan sensus ini dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu dengan akan diadakannya sensus barang daerah ini, diharapkan kepada seluruh Unit Kerja untuk segera mempersiapkan data-data barang daerah dengan mendayagunakan pengurus barang yang ada di Unit Kerja masing-masing. Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan pelaksanaan tugas pengawasan dengan bentuk tim Penegak Disiplin (Provost) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar.

Tim Penegak Disiplin Satuan Pamong Praja Provinsi Kalbar, mulai bertugas sejak tanggal 21 April 2008 dan dipersiapkan pula untuk mendukung pelaksanaan Operasi Wibawa Praja yang rencananya dilaksanakan bersama antara Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, dan satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar untuk memantau tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar pada jam-jam kerja.

Sebagai wujud kerjasama dalam memberikan dukungan untuk peningkatan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dan segenap Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalbar pada umumnya, diharapkan Unit-unit kerja di lingkungan kantor Gubernur Kalbar, meningkatkan disiplin di tempat kerja dan mengurangi kehadiran karyawannya ditempat-tempat umum dalam jam kerja diluar tugas.

Saudara-saudara peserta apel yang berbahagia.

Dalam bidang pelayanan Jemaah Haji di Kalbar, terkait dengan upaya-upaya mewujudkan dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Provinsi Kalbar secara profesional, berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penempatan Jumlah Anggota, Unsur dan Syarat Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), akan dilakukan test yang direncanakan pada akhir bulan April dan awal bulan Mei 2008, melalui seleksi administrasi, test tertulis, psikotest dan wawancara.

Kita berharap dengan *recruitment* calon TPHD yang dilakukan melalui serangkaian test dimaksud, dapat dipilih anggota TPHD yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat memberikan citra positif terhadap penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji di Kalbar.

Dalam bidang Perekonomian, sepanjang tahun 2008 yang telah kita lalui, harga-harga beberapa kebutuhan pokok cenderung terus mengalami peningkatan, bahkan untuk gas elpiji sering terjadi kelangkaan stock di pasaran karena adanya konversi penggunaan minyak tanah ke produk gas elpiji. Terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut antara lain disebabkan oleh tingkat ketergantungan pada produk impor yang cukup tinggi, seiring dengan naiknya harga BBM dunia, dan meningkatnya jumlah permintaan.

Pada bulan Maret 2008 yang lalu tingkat inflasi di kota Pontianak tercatat sebesar 1,78%, sedangkan untuk nasional 0,95%. Tingkat inflasi yang tinggi, baik disebabkan oleh meningkatnya jumlah permintaan maupun meningkatnya biaya produksi perlu kita waspadai, karena akan berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat dan bertambahnya tingkat kemiskinan. Oleh karena itu agar masyarakat tetap dapat mencukupi kebutuhan pokoknya dengan harga yang terjangkau, saya harapkan agar instansi-instansi terkait secara seksama terus memonitor perkembangan harga-harga kebutuhan pokok tersebut dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melakukan tindakan preventif untuk mencegah pengusaha/distributor melakukan tindakan spekulatif dan menimbun barang-barang kebutuhan masyarakat untuk maksud memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Selanjutnya di bidang pemerintahan, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009, Rapat Paripurna DPR-RI dengan Pemerintah tanggal 3 Maret 2008 yang lalu, telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang.

Terkait dengan disahkannya UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tersebut, ada satu hal penting yang perlu kita ketahui bahwa untuk Pelaksanaan Pemilu 2009 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2009 nanti, para pemilih tidak akan lagi menggunakan kartu pemilih tetapi cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dengan demikian, KTP sebagai identitas domisili sekaligus akan berfungsi sebagai kartu pemilih dalam Pemilu.

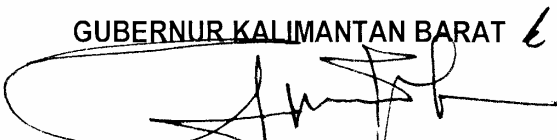
Oleh karena itu sebagai abdi negara yang harus menjadi contoh bagi masyarakat kita sebagai PNS diharapkan tidak ada lagi yang memiliki KTP ganda, karena melalui sistem aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap orang/penduduk yang akan membuat KTP ganda akan segera diketahui apakah sebelumnya ia sudah pernah memiliki/membuat KTP di daerah lain.

Selanjutnya sebagai upaya kita dalam mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan sebagai sub sistem dari Sistem Administrasi Negara maka pada kesempatan ini saya minta kepada para PNS yang belum memiliki KTP agar segera membuatnya pada instansi terkait yang berwenang menerbitkan KTP dengan mengikuti prosedur pendaftaran penduduk yang berlaku serta senantiasa aktif dalam melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi pelaksana dan dapat turut berperan serta aktif didalam mensosialisasikan kebijakan yang terkait dalam upaya kita mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kalbar.

Saudara-saudara peserta apel yang berbahagia.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan apel awal bulan. Sekali lagi saya mengajak seluruh PNS untuk senantiasa meningkatkan motivasi dan etos kerja serta terus mengembangkan diri dalam menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melindungi kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**   
**Drs. CORNELIS, MH**